

## INTISARI

Penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian parkir kendaraan bermotor di Mall Lembuswana Samarinda, merupakan penelitian hukum normatif. Oleh karena itu yang diteliti ialah meliputi asas-asas, kaidah-kaidah, dan pengertian hukum yang terdapat dalam hukum perjanjian maupun yurisprudensi yang berkaitan dengan perjanjian pada umumnya dan perjanjian parkir kendaraan bermotor pada khususnya.

Adapun tujuan penelitian ini, adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian parkir kendaraan bermotor di Mall Lembuswana Samarinda, untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perselisihan yang timbul antara para pihak dalam perjanjian parkir kendaraan bermotor yang didalamnya terdapat klausula eksonerasi dan bagaimana seyogyanya pelaksanaan perjanjian parkir kendaraan bermotor.

Hasil penelitian di Mall Lembuswana Samarinda menunjukkan bahwa perjanjian Parkir kendaraan bermotor ternyata merupakan perjanjian penitipan. Sebagai perjanjian campuran unsur-unsur perjanjian tersebut secara analogis dapat diterapkan.

Bahwa pengelola mempunyai kewenangan lebih dibandingkan pemarkir. Kewenangan tersebut terbukti adanya karcis tanda yang dibuat pengelola memuat klausula eksonerasi bahwa “segala kehilangan dan kerusakan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang di dalamnya adalah menjadi resiko sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun”. Sehingga pengelola lepas tanggung jawab jika kendaraan hilang/rusak atau tertukar. Padahal jika diteliti dengan memperhatikan asas-asas hukum perjanjian dan syarat-syarat sah nya perjanjian, parkir kendaraan bermotor juga merupakan perjanjian baku yang tetap harus tunduk pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerduta.

Cara penyelesaian perkara yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian parkir kendaraan bermotor dengan klausula eksonerasi di Mall Lembuswana Samarinda, ternyata dapat ditempuh melalui dua cara. Pertama, secara kekeluargaan yaitu dengan cara memberikan ganti rugi terhadap kendaraan yang hilang/rusak atau tertukar. Adapun besar kecilnya ganti rugi ditentukan oleh kedua belah pihak, dengan mengesampingkan klausula eksonerasi yang tertulis dalam karcis tanda parkir. Kedua melalui pengadilan yaitu dengan cara menyamakan bahwa parkir merupakan perjanjian penitipan barang dan ganti rugi terhadap kendaraan bermotor yang hilang/rusak atau tertukar secara tanggung renteng menjadi tanggung jawab juru parkir dan pengelola parkir dalam hal ini. Adapun Klausula eksonerasi yang tertulis dalam karcis tanda parkir dikesampingkan.

Upaya perlindungan hukum konkrit yang dapat diberikan pada pihak yang dirugikan adalah melalui tindakan preventif yang dilakukan oleh pembentuk Undang-undang dan tidak represif melalui pengadilan dimana hakim dapat menilai pelaksanaan perjanjian parkir kendaraan bermotor berdasarkan asas itikad baik, penyalahgunaan keadaan, penafsiran normatif terhadap isi perjanjian dan penyalahgunaan hak.

**Kata kunci :** *Perjanjian parkir, Kendaraan bermotor, Klausula Eksonerasi.*

#### ABSTRACT

The reason on contracts of motor vehicle parking in Mall Lembuswana, for this thesis is a normative research. It is, therefore focused on principles, norms and meaning of contracts in general and contracts of motor vehicle parking in particular as well as judicial decisions related to them.

The aims of this research are to find out how the practices of the contracts on motor vehicle parking in Mall Lembuswana to examine how the disputes arising from them especially when the exoneration clauses exist, are settled, and to analyze how the practices of the contracts should be.

This research reveals that such kinds of contracts constitute mixed contracts between those on consignment of goods and those on lease, because in practice those elements may exist and apply analogically.

Accordingly, Mall Lembuswana has more authority than the parking persons. The authority can be seen clearly from parking tickets issued by Mall Lembuswana which include the exoneration clauses stating that "parking persons are not responsible for any lost vehicle". This also means that the government does not take any responsibility in the case of lost, broken or changed over of any vehicle. This should not happen if the principles and conditions of contract are taken into account. Even though the contracts of motor vehicle parking constitute standardized contracts, they stay abide by the Articles 1320 and 1338 of the Civil codes.

In case of disputes arising from the implementation of the contracts of motor vehicle parking including the exoneration clauses in Mall Lembuswana, there have been two ways to settle them. First, by the way of compromise, the parking persons give some injury compensation to the owner of lost, broken or change over of vehicle. How much the compensation is given depends on the parties, irrespective of the exoneration clauses. Second, by filling the disputes to the court, the owner claim that such contracts constitute those of consignment, and the compensation should be imposed on the parking persons and the government collectively, irrespective of the exoneration clauses.

The serious effort for the legal protection should be given through preventive actions of the government as a legislator and repressive actions through the court in which judges can evaluate the implementation of the contract based on the principles of good faith, abuse, and normative interpretation of the substance of the contracts and abuse.

**Keywords :** *Parking Contracts, motor vehicle, exoneration clause.*